BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerjasama investasi Amerika Serikat – Indonesia sebelum Perjanjian *Comprehensive Partnership*

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Arus investasi langsung ke negara-negara Asia telah meningkat pesat sejak awal tahun 1990an.

Meskipun sempat menurun ketika terjadi krisis Asia, aliran masuk FDI ke negara – negara tersebut telah kembali meningkat pesat paska krisis. Namun demikian, kenaikan aliran modal masuk di dalam bentuk FDI ke Indonesia masih relatif terbatas.

Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui perkembangan FDI di Indonesia agar kebijakan untuk mendorong peningkatan aliran FDI dapat lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal dalam bentuk FDI di Indonesia.

Pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factors*) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*). *Pull factors* dari masuknya FDI antara lain terdiri dari

kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan yang termasuk *pull factors* antara lain strategi investasi maupun strategi produksi dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima.

Aliran FDI dunia mengalami peningkatan sejak tahun 1990-an dengan puncaknya terjadi di tahun 2000, hal ini terutama didorong oleh arus FDI ke negara berkembang yang dilakukan oleh negara-negara donor seperti Amerika Serikat.

Di bidang investasi, pada tahun 2010 realisasi investasi AS di Indonesia mencapai US$ 930,8 juta, meningkat 542,7% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah US$ 171,5 juta. Dengan jumlah tersebut, AS merupakan investor terbesar ke-tiga di Indonesia setelah Singapura dan Inggris. Untuk periode Januari – Maret 2011, nilai investasi AS di Indonesia mencapai 359,1 juta USD atau urutan kedua terbesar setelah Singapura.

Untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi RI-AS, terdapat forum"*Trade Investment Council*" (TIC) tingkat Menteri guna membahas dan menyelesaikan berbagai isu perdagangan dan investasi kedua negara. TIC terdiri dari empat Working Group, yaitu WG on Industrial and Agricultural Products, WG on Illegal Logging and Asociated Trade, WG on Intellectual Property Rights, dan WG on Investment.

Sementara itu dalam rangka menjamin investasi AS di Indonesia, pada tanggal 14 April 2010 di Washington, D.C. telah ditandatangani persetujuan

Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA-OPIC) RI – AS oleh Kepala BKPM dan Acting President OPIC. Perjanjian ISA-OPIC ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan minat investor AS menanamkan modal di Indonesia (http://www.deplu.go.id/Lists/BilateralCooperation/DispForm.aspx?ID=11 Diakses 20/07/2013).

Pemerintah Amerika Serikat berharap volume perdagangan dengan Indonesia akan meningkat dua kali lipat dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan itu, interaksi yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat serta perusahaan di kedua negara harus ditingkatkan. Selain itu, lalu lintas pertukaran barang sepatutnya tidak mendapatkan hambatan.

Lingkungan bisnis di Indonesia merupakan suatu peluang yang bagus untuk investasi langsung. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sering merasa sulit dan memakan waktu yang lama untuk memasuki pasar Indonesia. Dengan keadaan yang semakin membaik untuk masuk ke pasar Indonesia dan berbagai masalah aturan hukum dan kebijakan-kebijakan ekonomi dapat disepakati oleh Amerika Serikat dan Indonesia.

4.2 Program - program yang dilakukan Indonesia – Amerika Serikat dalam meningkatkan kerjasama investasi di Indonesia

Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar

negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakan mesin ekonomi mengawal pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

Tujuh belas perusahaan UKM (usaha kecil dan menengah) dari AS mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari misi dagang "*Trade Winds Asia*". Misi yang melibatkan kunjungan ke lima negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ini bertujuan untuk memperluas kesempatan bisnis bagi perusahaan-perusahaan AS di kawasan tersebut. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Ted Osius ikut menyambut para perwakilan dari ke-17 perusahaan di Jakarta. Dalam misinya di Indonesia, para peserta Trade Winds Asia bertemu dengan anggota-anggota Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Kamar Dagang Amerika di Indonesia dan berbagai mitra bisnis potensial. Misi ini juga berusaha mendukung perkembangan ekonomi dan lapangan kerja di kedua negara. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam misi ini berasal dari berbagai sektor seperti asitektur, pembangkitan tenaga, industri bahan bangunan, pertambangan, transportasi, teknologi informasi dan manufaktur.

Kemudahan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia – negara ke-empat terbesar penduduknya di dunia – lewat dukungan *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) hari ini telah semakin ditingkatkan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian oleh kedua negara.

Dr. Lawrence Spinelli, Presiden sementara di OPIC, dan Gita Wirjawan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, menandatangani sebuah perjanjian bantuan investasi dalam sebuah upacara yang diadakan di Washington, D.C dan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono.

Perjanjian baru tersebut memperbarui perjanjian yang pernah dicapai pada 1967 antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan menambahkan produk-produk OPIC seperti direct loans, coinsurance dan reinsurance sebagai usaha OPIC untuk mendukung perusahaan-perusahaan AS dalam berinvestasi di Indonesia.

Dengan menggaris bawahi pentingnya sebuah hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di antara kedua negara, perjanjian ini mempertegas adanya keinginan bersama untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pengembangan sumber-sumber daya ekonomi di Republik Indonesia. Indonesia menawarkan sebuah pasar yang luas dan dinamis bagi investasi AS yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia – sebuah prospek yang menjanjikan berkat penandatanganan perjanjian. Pemerintah Indonesia berharap dapat bekerjasama secara erat dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan untuk memfasilitasi tingkat investasi di Indonesia (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid_14042010.html Diakses 02/08/2013).

Sebagai bagian dari program Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam meningkatkan perdagangan dan kesempatan berinvestasi antara Indonesia dan AS dibawah prakarsa kemitraan komprehensif AS-Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Francisco Sanchez memimpin misi delegasi perusahaan-perusahaan AS berkunjung ke Indonesia, 11-13 November 2012. Delapan perusahaan kelas dunia AS di sektor pembangunan infrastruktur turut serta dalam misi ini bersama dengan institusi pemerintah AS untuk investasi luar negeri OPIC (Overseas Private Investment Corporation) serta Badan Pembangunan dan Perdagangan AS (USTDA). Para anggota delegasi bertemu dengan beberapa pejabat tinggi di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian PPN/BAPPENAS, dan lembaga lainnya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kebijakan di sektor infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang utama.

Indonesia merupakan tujuan menarik bagi para investor Amerika dan merupakan mitra dagang yang penting bagi AS. Indonesia merupakan pasar dinamis yang menawarkan kesempatan yang besar di sektor pembangunan dan teknologi infrastruktur seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, kebutuhan infrastruktur yang bervariasi mulai dari penerbangan hingga teknik dan konstruksi juga meningkat. Perusahaan-perusahaan AS ini dapat membawa pengalamannya yang luas di seluruh lini untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan proyek-proyek utama.

OPIC dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) yang mencakup mencakup kerjasama OPIC dan PII untuk mempromosikan investasi pihak swasta AS dalam bidang infrastruktur di

Indonesia. Kesepakatan ini juga mendukung upaya bersama untuk mengidentifikasi prospek proyek gabungan, penawaran asuransi bersama, penjaminan untuk meningkatkan ketentuan pembiayaan proyek infrastruktur serta meningkatkan portofolio OPIC di Indonesia. "Kenaikan investasi di sektor infrastruktur yang didukung oleh OPIC akan membantu Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan yang berpartisipasi dalam misi ini adalah:

1. Black and Veatch – Overland Park, Kan.
2. Cisco Systems – San Jose, Calif.
3. General Electric Company – Fairfield, Conn.
4. Honeywell International, Inc. – Morristown, N.J.
5. Oshkosh Corporation – Oshkosh, Wisc.
6. The Shaw Group – Baton Rouge, La.
7. Westinghouse Electric Company – Cranberry Township, Pa.
8. WorleyParsons LLC – Bellaire, Texas

Misi perdagangan ini merupakan salah satu contoh komitmen Amerika Serikat untuk memperluas hubungan bisnis dengan Indonesia guna mendukung penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi di kedua Negara. (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_14112012.html Diakses 02/08/2013)

Komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia serta memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi kedua negara mendapatkan perhatian khusus pada minggu ini dengan serangkaian

kunjungan, pertemuan dan pernyataan yang menggaris bawahi manfaat yang diperoleh bagi rakyat kedua negara dengan meningkatnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika.

Delegasi US-ASEAN Business Council merupakan misi perdagangan terbesar dalam sejarah, dengan 75 anggota mewakili 35 perusahaan, mengadakan kunjungan ke Jakarta. Para anggota delegasi dari perusahaan-perusahaan besar maupun yang menengah hingga kecil, memfokuskan pada sektor pembangunan infrastruktur, pembangkitan energi dan jasa keuangan dalam pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertahanan, serta pemimpin-pemimpin bisnis di Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Energi AS David Sandalow memimpin delegasi lainnya yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi AS di Sektor Energi dan Keuangan untuk mengikuti acara 2nd *U.S.-Indonesia Energy Investment Roundtable*. Dalam acara ini, para pejabat AS membagi informasi tentang transformasi yang terjadi di AS dimana negara tersebut berubah dari negara pengimpor gas alam menjadi negara pengekspor dalam waktu kurang dari sepuluh tahun berkat teknologi-teknologi baru. Para pejabat-pejabat dari Departemen Energi AS juga bertemu dengan para rekan sejawat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dibawah kerangka *U.S.-Indonesia Energy Policy Dialogue* untuk bertukar informasi dan mendukung pengembangan sumber daya gas non-konvensional di Indonsia.

Departemen Energi AS, perwakilan dari *U.S. Overseas Private Investment Corporation* dan Badan Pengembangan Perdagangan turut dalam diskusi dengan perusahaan-perusahaan AS dan Indonesia mengenai pendanaan guna mendukung studi kelayakan dan investasi dalam proyek-proyek energi dan infrastruktur di Indonesia. Direktur U.S. Ex-Im Bank Patricia Loui melakukan pertemuan dengan para pejabat perusahaan dan pemerintahan di Jakarta untuk membahas kredit senilai satu milyar dollar yang disediakan untuk berbagai proyek di Indonesia.

Para perwakilan dari AS termasuk ilmuwan terkemuka Dr. Roger Beachy dan Dr. Edwin Price ikut dalam *Jakarta Food Security Summit* untuk berbagi informasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian baru yang dapat mendorong hasil panen dan pendapatan bagi para petani. Dubes Marciel juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memperluas teknologi pertanian dan kemitraan pendidikan yang telah ada termasuk melalui program USAID dengan tema *Agribusiness Market and Support Activity* senilai 15 juta dollar yang akan meningkatkan akses pangan, pasar terbuka, dan produktivitas petani.

Angel Investor terkemuka asal AS John May memimpin diskusi di pusat kebudayaan Amerika berteknologi tinggi. John May membagi pengalamannya selama 20 tahun dalam membuat perencanaan bisnis guna menarik para angel investor (investor individual yang akan memulai sebuah usaha). Dalam kunjungannya untuk menghadiri *ASEAN Regional Entrepreneurship Summit*, Investor asal Amerika ini memberikan pembiyaan untuk seorang wirausahawan asal Indonesia. Bekerja sama dengan *Global Entrepreneurship Program Indonesia* (GEPI) membentuk jaringan angel investor di Indonesia.

Semua kegiatan ini memperlihatkan upaya berkelanjutan Amerika Serikat untuk memperluas hubungan perdagangan dan bisnis dengan Indonesia melalui Kemitraan Komprehensif. Amerika Serikat adalah negara perdagangan terkemuka di dunia. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), AS adalah pengimpor terbesar di dunia untuk barang dan jasa. Tahun 2010, AS telah mengimpor barang senilai 1,97 triliun dolar atau 30 percent dari total impor barang di dunia, sehingga menjadikan negara ini pengimpor barang terbesar kedua. Dari Januari hingga November 2011, total nilai ekspor barang Indonesia ke AS mencapai 17,7 miliar dolar. Dalam periode yang sama, jumlah total barang yang diimpor dari AS ke Indonesia mencapai 6,7 miliar dolar, sehingga Indonesia mendapatkan surplus perdagangan sebesar 11 miliar dolar AS. Perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia terus berkembang, untuk periode Januari-November 2011, pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS mengalami mencapai 18 %, sedangkan ekspor AS ke Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5 % (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_10022012.html Diakses 02/ 08/2013).

Duta Besar AS Scot Marciel, didampingi oleh Presiden Boeing untuk Asia Tenggara, Skip Boyce dan CEO GE Indonesia Handry Satriago, melihat Pusat Pelatihan Garuda bersama CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar pada 6 J. GE dan Boeing yang bermitra dengan Garuda menawarkan bantuan pelatihan dan teknis dalam bentuk pengembangan kepemimpinan, peningkatan kapabilitas pemeliharaan, dan pelatihan pilot. Hal lain yang turut menjadi sorotan dalam kunjungan ini adalah peninjauan contoh kokpit untuk prosedur pelatihan

terintegrasi, presentasi oleh para awak pesawat Garuda, dan pelatihan keselamatan di kolam milik Garuda. Setelah meninggalkan lokasi kampus, Duta Besar kembali menegaskan komitmen Amerika Serikat melalui Kemitraan Komprehensif untuk bekerjasama mewujudkan penerbangan langsung antara Indonesia dan Amerika Serikat (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_09072012.html Diakses 02/08/2013).

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dalam sebuah program untuk memperkuat kemampuan analisis dan memajukan pengembangan ekonomi Indonesia.

Program ini bertujuan membantu Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemampuan masyarakat dan institusi di Indonesia untuk melakukan analisis ekonomi. Usaha ini juga akan mendorong tujuan dari kemitraan komprehensif antara AS dan Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran, menjaga lingkungan hidup, memperkuat keamanan, meningkatkan saling pengertian, serta menjamin keamanan rakyat Indonesia dan Amerika.

Direktur USAID/Indonesia Walter North berharap dapat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia sebagai mitra, untuk meningkatkan iklim usaha, mendorong investasi dan perdagangan, membina lapangan pekerjaan yang produktif, serta memperkuat sektor finansial non-perbankan (http://indonesian. jakarta.usembassy.gov/prid_30032011.html Diakses 02/08/2013).

Amerika Serikat dan Indonesia kembali meraih pencapaian yang penting di bawah Kemitraan Komprehensif antara kedua negara dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) pada 8 Agustus untuk mendukung kerjasama bilateral secara lebih luas dalam proyek pembangunan infrastruktur. Asisten Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis, José Fernandez yang sedang berkunjung ke Indonesia dan Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Agus Tjahajana menandatangani MOU tersebut di Kementerian Perindustrian. Dengan adanya kesepakatan dalam MOU ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi kalangan bisnis Amerika dan Indonesia untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan infrastruktur di sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti zona industri, energi dan listrik, transportasi, air bersih, dan pengembangan industri ramah lingkungan di koridor utama di bawah Rencana Induk Indonesia seperti Sumatra, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Duta Besar AS Scot Marciel yang menyaksikan penandatanganan tersebut bersama Menteri Perindustrian RI M.S. Hidayat. MOU ini adalah sebuah contoh lagi bagaimana Kemitraan Komprehensif antara kedua negara akan memberi manfaat bagi masyarakat Amerika dan Indonesia. Hal ini akan membuka peluang lebih bagi kerjasama untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan infrastrukturnya dan pada saat yang sama membantu mengembangkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sebuah contoh kerjasama yang lebih besar dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah kesepakatan yang baru-baru ini dicapai antara perusahaan *Amerika Celanese Corporation* dan Pertamina untuk mengembangkan proyek

bahan bakar etanol sintetis; sebuah potensi investasi senilai dua milyar dollar oleh Celanese Corporation. Perwakilan dari Celanese Corporation turut hadir dalam penandatanganan MOU (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_0908 2012.html Diakses 02/08/2013).

Kedutaan Besar AS mengumumkan kemitraan baru antara Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam bidang prioritas global termasuk ketahanan pangan, upaya pelestarian dan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan. Kerjasama terbaru ini merupakan bentuk dukungan dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia.

Amerika Serikat merasa gembira dapat memulai kemitraan baru dengan KADIN dan meletakkan dasar kerjasama masa depan dengan dunia bisnis Indonesia. Peningkatan hubungan antara Amerika Serikat dan dunia bisnis Indonesia membantu memperkuat ekonomi kedua negara, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan mata pencaharian. Semakin kita bekerjasama dan bertukar ide, barang, dan sumber daya manusia antara kedua negara, semakin banyak manfaat untuk Amerika dan Indonesia.

USAID bekerja sama dengan KADIN saat berlangsungnya pameran dagang di Jakarta untuk mempromosikan pemanfaatan perikanan yang secara berkesinambungan. Amerika Serikat dan KADIN akan memperluas kerjasama untuk meningkatkan akses pangan, membuka pasar yang lebih luas untuk perdagangan, dan meningkatkan produktivitas dan kesinambungan di sektor pertanian dan perikanan.

Program bersama dalam kemitraan ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap kredit dan asuransi tanaman pangan. Akses terhadap kredit akan memungkinkan petani untuk berinvestasi di lahannya dan membeli sarana produksi yang lebih baik. Asuransi tanaman pangan, mirip dengan asuransi jiwa, akan memberikan jaminan kembalinya biaya yang dikeluarkan petani jika terjadi gagal panen. Peningkatan pengembangan ekonomi berbasis kelautan secara berkesinambungan untuk mendorong pendapatan, produksi pangan, dan peluang bisnis. Saat ini Amerika Serikat dan Indonesia bekerjasama dalam pelaksanaan berbagai program "Ekonomi Biru" secara lintas sektor. Tercatat bahwa berbagai program USAID telah memberikan kontribusi lebih dari US$ 30 juta untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi melalui pemanfaatan yang berkesinambungan dengan pelestarian sumber daya kelautan (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_10032012.html Diak ses 02/08/2013).

Kedutaan Besar AS, bermitra dengan Kementerian Perhubungan, bekerjasama untuk meningkatkan keamanan di pelabuhan-pelabuhan melalui bantuan pelatihan dan peralatan senilai 1 juta USD. Wakil Duta Besar AS Ted Osius dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Leon Muhamad melakukan penyerahan 74 unit detektor radiasi perseorangan dan empat alat pengidentifikasi radio isotop yang akan membantu dalam pendeteksian dan pencegahan peredaran material-material radioaktif dan nuklir illegal. Selain itu, Wakil Dubes Osius juga menyoroti program pelatihan yang disponsori oleh AS untuk meningkatkan keamanan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Timur Laut dan Sulawesi Utara.

Bantuan ini akan mendukung usaha-usaha Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah kriminalitas internasional besar, seperti penyeludupan manusia, peredaran narkoba dan transit para teroris. Peningkatan keamanan pelabuhan membuka jalan untuk peningkatan perdagangan internasional dan regional dan akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Wakil Duta Besar Osius menggarisbawahi pentingnya kerjasama keamanan sebagai salah satu komponen dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia dalam meningkatkan keamanan sehingga mendorong para investor melihat keamanan di Indonesia sebagai tujuan investasi.

Upaya Kedubes AS ini merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kejahatan Internasional *(International Criminal Investigative Training Assistance Program/ICITAP)* untuk Proyek Pengamanan Pelabuhan di bawah Departemen Kehakiman AS dan Program Pengendalian Ekspor dan Pengamanan Perbatasan Terkait *(Export Control and Related Border Security/EXBS)* di bawah Departemen Luar Negeri AS. ICITAP bermitra dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan lembaga-lembaga pengamanan laut Indonesia yang terkait untuk meningkatkan infrastruktur dan operasional pengamanan pelabuhan di Nunukan dan Tarakan di wilayah timur laut Kalimantan dan pelabuhan internasional penumpang di Bitung, Sulawesi Utara. Bantuan ICITAP termasuk pengembangan infrastruktur dan peralatan bagi ketiga pelabuhan senilai total 759.000 USD (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_27042012.html Diakses 02/ 08/2013).

Indonesia merupakan salah satu negara tercepat di dunia berkembang dan menyajikan kesempatan yang menarik bagi perusahaan-perusahaan AS yang menawarkan produk dan layanan yang membantu memenuhi kebutuhan yang berkembang pesat infrastruktur. Indonesia berusaha untuk berinvestasi 250 milliar USD di infrastruktur. Investasi infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi dan investasi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi. Dan telah menciptakan sejumlah model pembangunan ekonomi ke depan, termasuk Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau "MP3EI". Selain itu, negara ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta untuk mendanai setengah dari ekspansi besar-besaran ini melalui Public-Private Partnership (PPP) model. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia (diproyeksikan sekitar 6% selama 5 tahun ke depan) telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur dan negara membutuhkan signifikan di luar keahlian untuk memenuhi target ambisius. Industri AS untuk memasok jenis jasa arsitektur, desain dan keahlian teknik dan manajemen proyek yang diperlukan untuk berhasil menangani proyek-proyek besar. Teknologi AS juga posisi yang baik untuk merasionalisasi penggunaan energi dan produksi untuk mendukung kawasan industri baru yang dibangun di negeri ini defisit kronis energi.

Presiden Yudhoyono meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang akan membawa negara hingga tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia, perekonomian terbesar ke-17 di dunia tahun lalu, salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025, mengambil GDP menjadi $ 4,5 triliun, dan peningkatan pendapatan per kapita dari $ 3000 sekarang untuk $ 15.000.

Untuk mencapai hal ini, rencana induk berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan tahunan rata-rata 8-9 % antara tahun 2015 dan 2025, dari 6,5% pada tahun 2012. MP3EI juga menetapkan target inflasi membawa turun dari 6 persen sekarang menjadi 3 persen pada pertengahan dekade berikutnya.

Dari masterplan tersebut menguraikan $ 468.500.000.000 dalam investasi yang akan dilakukan selama 14 tahun ke depan, termasuk dalam pekerjaan infrastruktur. Beberapa $ 63720000000 dari kas pemerintah telah disiapkan untuk investasi 2025, yang akan dilengkapi dengan $ 97930000000 dari BUMN.

Sektor Infrastruktur terkemuka di Indonesia adalah

1. Energi meliputi Pembangkit Tenaga Listrik dan Transmisi, Panas Bumi dan Biomassa.
2. Aviation meliputi Bandara, *Ground Support* dan Logistik.
3. Teknologi Lingkungan - Manajemen Sumber Daya Air dan Pencemaran / Pembuangan Teknologi
4. Arsitektur, Konstruksi dan Engineering - Jalan Tol, Pelabuhan Infrastruktur dan Proyek Besar

Industri tenaga listrik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam permintaan, rata-rata tujuh sampai sembilan persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Namun, karena kurangnya infrastruktur di sektor listrik, selama tahun 2000-2005, Indonesia masih menghadapi krisis listrik di berbagai daerah. Tarif listrik di Indonesia adalah 70,4% pada tahun 2011, salah satu tingkat terendah dari kapasitas terpasang di wilayah tersebut. Kekurangan ini mempengaruhi sekitar 80 juta orang Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

Karena Indonesia terus berkembang, perusahaan listrik milik pemerintah, PLN, berada di bawah tekanan yang signifikan untuk membuat pembangkit listrik baru dan meng-upgrade generasi saat ini dan infrastruktur transmisi. Pembangunan pembangkit listrik, transmisi dan distribusi listrik di Indonesia harus membawa peluang komersial yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan AS yang memasok jasa teknik dan peralatan seperti turbin, gardu, transmisi, trafo dan peralatan distribusi.

Selain itu, dengan beberapa tingkat tertinggi ketersediaan panas bumi di dunia, Indonesia menawarkan sejumlah peluang bagi perusahaan sepanjang siklus energi, dari pengeboran menanam instalasi transmisi. Biomassa dari perkebunan kelapa sawit dan sumber limbah bio juga menawarkan produksi skala kecil dan peluang untuk investasi oleh perusahaan-perusahaan AS dengan keunggulan teknologi.

Dengan populasi lebih dari 240 juta yang tersebar di 17.000 pulau, Indonesia menyajikan dirinya sebagai kesempatan penerbangan besar dan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat lalu lintas udara domestik di dunia.

Peningkatan jumlah penumpang pesawat dalam tiga tahun terakhir telah cukup mengesankan, dari 43,8 juta pada 2009 dan 5.885.0000 tahun 2011. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, memprediksi bahwa industri akan tumbuh antara 15 dan 20% pada tahun 2012.

Peluang yang signifikan ada di sepanjang semua subsektor, terutama di bidang pengembangan bandara, dukungan teknologi dasar dan infrastruktur logistik. Sebagai akibat dari lonjakan permintaan yang dibuat oleh kelas menengah dan penduduk yang besar, tersebar di Nusantara lebar Amerika Serikat, penerbangan swasta Indonesia mencari untuk bersaing di pertengahan pasar, yang memerlukan perkembangan yang signifikan dan bersamaan infrastruktur bandara di banyak daerah. Secara khusus, ada kebutuhan mendesak untuk saat ini dan sistem kontrol lalu lintas udara, peralatan tanah dukungan bandara, peralatan keselamatan dan keamanan, infrastruktur TI dan jasa, dan rekayasa dan logistik sekitarnya rantai pasokan bandara.

Selain itu, daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta semakin menghadapi masalah dalam mengelola sanitasi di dalam dan di luar kota sebagai penduduk terus meningkat, dan pengembangan properti dan urbanisasi mencapai ke seluruh pelosok nusantara. Perusahaan AS memiliki kesempatan dalam solusi untuk pembuangan limbah, terutama dalam mengelola pick-up dan pengiriman logistik, dan Limbah ke Energi.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dipandu oleh Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang dirilis pada Mei 2011. Sebanyak 367 proyek infrastruktur senilai sekitar US $ 440

billion yang dipamerkan dalam master plan, dengan mayoritas proyek-proyek dalam transportasi (yaitu jalan, jalan tol, kereta api, dan pelabuhan). Persetujuan terakhir RUU pembebasan lahan pada Desember 2011 diharapkan memiliki implikasi besar untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek, terutama jalan, jalan tol dan kereta api. Pertumbuhan riil untuk transportasi diperkirakan rata-rata lebih dari 8% selama lima tahun ke depan.

Sementara pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan pembatalan pelabuhan terminal kontainer besar, pemerintah masih menargetkan pembangunan pelabuhan, lima dari enam pelabuhan kontainer terbesar di negara itu saat ini menderita kemacetan dan diperkirakan 15mn kapasitas tambahan yang diperlukan pada tahun 2020 . Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang mencari bantuan untuk cepat membangun tiga pelabuhan baru di Jakarta, Batam dan Papua. Peluang ada untuk perusahaan-perusahaan AS dengan pengalaman di pelabuhan arsitektur, konstruksi dan rekayasa, serta logistik dan manajemen kontainer (http://export.gov/indonesia/majorprojectsandtenders/index.asp Diakses 10/08/ 2013).

Bertujuan untuk meningkatkan investasi AS di bidang infrastruktur di Indonesia, sektor penting untuk pertumbuhan negara itu masa depan ekonomi, *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), lembaga keuangan pembangunan Pemerintah AS, hari ini menyimpulkan nota kesepahaman (MOU) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). PII ini adalah perusahaan milik negara yang dibuat oleh Indonesia untuk melayani sebagai jendela tunggal

untuk menilai, penataan dan memberikan jaminan untuk Public-Private Partnership (PPP) proyek-proyek infrastruktur.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Francisco Sanchez, yang memimpin delegasi AS ke wilayah tersebut. Wakil Menteri Sanchez juga merupakan anggota Dewan Direksi OPIC.

MOU perjanji OPIC dan kerjasama PII dalam mempromosikan investasi infrastruktur sektor swasta di Indonesia melalui usaha bersama untuk mengidentifikasi prospek untuk dukungan proyek bersama, serta pelatihan dan penyaringan aplikasi, dalam rangka untuk meningkatkan portofolio OPIC di Indonesia ke tingkat konsisten dengan ukuran ekonominya.

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tujuan investasi yang baik untuk ibukota Amerika, dan merupakan mitra dagang penting bagi Amerika Serikat. Peningkatan investasi AS untuk memperluas infrastruktur Indonesia saat ini diharapkan hasil dari OPIC kerjasama yang lebih erat dengan PII, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cepat. Hal ini, pada gilirannya, akan mendukung perusahaan-perusahaan Amerika dan kemitraan antara kedua negara.

MOU periode dua tahun berfokus tentang OPIC terhadap Indonesia, lebih berfokus terhadap :

- Pada bulan Oktober 2012 Pengumuman $ 18.500.000 OPIC pinjaman untuk kemitraan dengan Citi Indonesia dan Bank Andara untuk mendanai yang terakhir kredit usaha mikro dalam negeri.

- Pada Bulan September 2012 Dewan persetujuan OPIC $ 60.000.000 pembiayaan untuk Falcon House Partners Indonesia Fund I yang akan berinvestasi dalam berkembang pesat menengah Indonesia dan segmen pasar menengah bawah, dengan fokus pada industri konsumen-driven, termasuk ritel, produk makanan, produk perawatan pribadi dan perawatan kesehatan.
- Pada bulan Mei 2011 konferensi investasi internasional di Jakarta disponsori oleh OPIC dan dibuka oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang menarik lebih dari 300 peserta dari seluruh Asia Tenggara, dan
- Pada bulan April 2010 Penandatanganan perjanjian investasi bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, merampingkan kemampuan OPIC untuk mendukung investasi di Indonesia.

Selama sejarah 41 tahun, OPIC telah memberikan hampir $ 2,6 miliar pada pembiayaan dan asuransi resiko politik untuk 112 proyek di Indonesia, dan memelihara portofolio saat ini sebesar US $ 56 juta pada negara.

OPIC adalah lembaga keuangan pembangunan Pemerintah AS. Ini memobilisasi modal swasta untuk membantu memecahkan tantangan pembangunan yang sangat penting dan dengan berbuat demikian, kemajuan kebijakan luar negeri AS. Karena karya OPIC dengan sektor swasta AS, membantu perusahaan di AS mendapatkan pijakan di pasar negara berkembang katalisasi pendapatan, pekerjaan dan peluang pertumbuhan baik di rumah dan di luar negeri. OPIC mencapai misinya dengan menyediakan investor dengan

pembiayaan, penjaminan, asuransi risiko politik, dan dukungan untuk dana investasi ekuitas swasta (http://www.opic.gov/press-releases/2012/new-agreement-between-opic-and-indonesia-infrastructure-guarantee-fund-sets-goal Diakses 24/07/2013).

Kedutaan Besar Amerika Serikat hari ini meluncurkan proyek senilai 15,8 juta dollar AS dalam sebuah acara yang diadakan di Hotel Borobudur. Program *Support for Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI) akan membantu Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini juga akan membantu memperkuat kebijakan pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Disponsori oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), program SEADI akan mendorong tujuan Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia. Kemitraan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian, memajukan kesejahteraan, menjaga lingkungan dan memperkuat demokrasi bagi rakyat Indonesia dan Amerika Serikat.

Tujuan dari proyek selama 30 bulan ini adalah untuk memperbaiki kebijakan ekonomi di bidang-bidang seperti lingkungan bisnis, perdagangan dan investasi, pasar tenaga kerja, dan lembaga keuangan nonbank, dan memperkuat kapasitas analisis ekonomi masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga lokal. SEADI akan menggunakan lembaga yang ada di Indonesia untuk melaksanakan analisis ekonomi dan peningkatan kapasitas. Program ini akan menyediakan

pelatihan jangka panjang bagi sejumlah orang Indonesia (http://indonesianjakarta.usembassy.gov/prid12052011.html Diakses 02/08/2013).

Duta Besar AS Scot Marciel dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Bapak Ignasius Jonan, menandatangani kesepakatan hibah sebesar hampir 600.000 USD untuk mendanai program bantuan teknis oleh Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (*U.S. Trade and Development Agency* atau USTDA)) untuk mendukung rencana pengembangan PT KAI guna memenuhi peningkatan permintaan jasa perkeretaapian, sekaligus memastikan keamanan jaringan kereta api. Sebagai hasil dari prakarsa yang merupakan bagian dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia ini, PT KAI akan mengembangkan rencana strategis baru dalam hal peninjauan koridor-koridor transportasi kereta api, rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan mutu sistem, dan lokakarya-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para operator dan manajer di lingkungan PT KAI.

Hibah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah AS untuk mendukung upaya-upaya Indonesia dalam meningkatkan prasarana transportasinya. Bantuan teknis ini akan membantu pengembangan staf PT KAI melalui lima lokakarya pelatihan dalam hal pengoperasian dan pemeliharan sistem sinyal tingkat lanjutan. Hibah tersebut juga akan mendukung PT KAI dalam mengembangkan rekomendasi-rekomendasi khusus dalam meningkatkan mutu sistem sinyal dan telekomunikasi kereta api dengan dukungan pemerintah AS. Kegiatan-kegiatan ini akan membuka peluang bagi para pebisnis AS untuk mengembangkan kemitraan-

kemitraan baru dalam industri perkeretaapian Indonesia yang dinamis dan sedang berkembang.

Amerika Serikat sangat gembira memberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis untuk Rencana Induk Perkeretaapian Nasional di Indonesia sebagai salah satu contoh komitmen untuk mendukung pembangunan Indonesia serta meningkatkan perdagangan di antara kedua negara yang digagas oleh Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono ketika menetapkan prakarsa Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS sangat bersemangat untuk bekerjasama dan berinvestasi di pasar ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh, dan hibah ini akan membantu memfasilitasi hubungan tersebut (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid_15092011_2.html Diakses 02/08/ 2013)

Amerika Serikat dan Indonesia kembali meraih pencapaian yang penting di bawah Kemitraan Komprehensif antara kedua negara dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) pada 8 Agustus untuk mendukung kerjasama bilateral secara lebih luas dalam proyek pembangunan infrastruktur. Asisten Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis, José Fernandez perwakilan dari Amerika Serikat yang sedang berkunjung ke Indonesia dan Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Agus Tjahajana menandatangani MOU tersebut di Kementerian Perindustrian. MOU ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi kalangan bisnis Amerika dan Indonesia untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan infrastruktur di sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti zona industri, energi dan listrik, transportasi, air bersih, dan pengembangan

industri ramah lingkungan di koridor utama di bawah Rencana Induk Indonesia seperti Sumatra, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Kerjasama yang lebih besar dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah kesepakatan yang baru-baru ini dicapai antara perusahaan Amerika Celanese Corporation dan Pertamina untuk mengembangkan proyek bahan bakar etanol sintetis; sebuah potensi investasi senilai dua milyar dollar oleh Celanese Corporation. Perwakilan dari Celanese Corporation turut hadir dalam penandatanganan MOU (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_0908 2012.html Diakses 02/08/2013).

Kedutaan Besar Amerika Serikat didukung Ankasa Pura I dan Angkasa Pura II dalam menyelenggarakan Konfresi Global Bandara Indonesia (GAI) untuk menyoroti pentingnya pengembangan bandara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan memperluas perdagangan internasional dan perjalanan. Konferensi GAI adalah konferensi terbesar di bandara dan penerbangan yang diselenggarakan di Indonesia dan membawa bersama-sama orang Indonesia yang terlibat dalam pengembangan bandara dengan para pemimpin global, termasuk perusahaan-perusahaan AS yang menawarkan terbukti, hemat biaya dan solusi teknologi terkemuka untuk mendukung pembangunan bandara.

Berbicara pada pembukaan GAI Duta Besar AS Scot Marciel. Amerika Serikat bekerja melalui Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan kesuksesan. Perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan bandara di Indonesia seperti yang akan

dibahas pada konferensi ini, merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi. Banyak perusahaan AS berpartisipasi dalam Bandara Global Indonesia memiliki pengalaman dalam proyek-proyek pembangunan bandara di Amerika Serikat dan di banyak negara di seluruh dunia. Saya berharap bahwa perusahaan-perusahaan Amerika, melalui kepemimpinan teknologi dan pengalaman dalam memberikan solusi biaya efektif, dapat membantu dalam pengembangan masa depan bandara dan infrastruktur penerbangan di Indonesia (http://jakarta.usembassy.gov/news/embnews_6272013.html Diakses 02/08/2013).

Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel menyaksikan upacara penandatanganan hibah studi kelayakan antara Departemen Perdagangan AS (*U.S. Trade and Development Agency* atau USTDA) dan PT Energi Geothermal Teknosatria (TEG). Hibah senilai 546,766 dolar AS ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan proyek panas bumi swasta di Cibuni, Jawa Barat. Hibah ini merupakan hibah studi kelayakan USTDA ketiga untuk pengembangan situs panas bumi di Indonesia, dan merupakan kelanjutan pelatihan di tahun 2011 serta misi perdagangan, sebagai bagian dari Prakarsa Pengembangan Panas Bumi AS-Indonesia yang diluncurkan oleh USTDA tahun 2010. Meningkatkan hubungan bilateral dalam bidang pengembangan ekonomi dan kerja sama energi merupakan salah satu komponen utama Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat - Indonesia (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_17122012.html Diakses 02/08/2013).

Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel mengunjungi Makassar sebagai bagian lawatannya selama sepekan ke kawasan Indonesia

Timur. Dubes Marciel berpartisipasi dalam acara peletakan batu pertama proyek sistem meter terpusat di desa Rapocinni. Sistem tersebut akan menghubungkan pasokan air dari PDAM setempat dengan 60 hingga 100 rumah tangga di desa tersebut. Pembangunan sistem ini dapat terlaksana berkat dukungan rakyat Amerika melalui Green and Clean Program dari Badan Pembangunan International AS (USAID). Program USAID senilai 2,2 juta USD ini ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi 50.000 penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan, termasuk 7.000 jiwa di Makassar. Di Makassar, Dubes Marciel juga berpartisipasi dalam dialog dengan organisasi lingkungan hidup, perusahaan perikanan, LSM serta para akademisi untuk menyusun strategi dan mendiskusikan isu-isu seputar perikanan berkelanjutan dan pengelolaan kawasan lingkungan laut (http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_19062012.html Diakses 02/08/2013).

4.3 Kendala yang dihadapi Amerika Serikat dalam implementasi Perjanjian Comprehensive Partnership di bidang investasi di Indonesia

Investasi selalu mencakup faktor risiko. Pada umumnya boleh dikatakan bahwa semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga potensi laba. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan bahwa investasi tertentu sangat menguntungkan (misalnya di pasar saham, bidang properti dan komoditas), namun berinvestasi di Indonesia juga menyiratkan lebih banyak risiko dibandingkan berinvestasi di negara-negara yang maju karena Indonesia

mempunyai dinamika dan karakteristik tertentu yang dapat menggagalkan investasi dan mengganggu iklim investasi.

Beberapa hal dari Indonesia yang dapat menghambat kerja sama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat antara lain adalah sebagai berikut:

a. Daya saing industri dalam negeri yang lemah

Di tengah implementasi *Free Trade Agreement* (FTA), penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri menjadi sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri, melalui penerapan berbagai macam regulasi teknis dan tata niaga untuk pengamanan pasar dalam negeri, serta program-program promosi seperti kampanye cinta produk dalam negeri, sosialisasi produk dalam negeri hingga melalui pameran-pameran. Peningkatan daya saing melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan menjaga kualitas dan standar.

Kementerian Perindustrian Indonesia telah melakukan empat langkah strategis terkait penguatan daya saing industri dalam negeri3. Pertama, restrukturisasi industri. Langkah ini terkait dengan pemanfaat teknologi yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan melalui restrukturisasi permesinan dan peralatan produksi yang lebih *eco-friendly*. Implementasi ini pada industri tekstil, alas kaku, gula, serta industri pupuk. Kedua, menjamin kecukupan bahan baku yang terkait dengan pengembangan industri hulu seperti industri gas, kimia dasar, dan logam dasar. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri melalui fasilitasi pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk

mendukung pelatihan dengan keahlian khusus di bidang industri. Keempat, perbaikan pelayanan publik melalui birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, Kementerian Perindustrian telah melakukan inisiatif melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk industri, kebijakan Tata Niaga seperti penerapan Importir Produsen (IP) maupun Importir Terdaftar (IT), penerapan *trade defends* seperti *safeguard*, *anti dumping*, dan *countervailing duties*, serta optimalisasi peningkatan penggunaan produk alam negeri (P3DN) di semua lini kegiatan perekonomian.

b. Gangguan keamanan

Keamanan berinvestasi menjadi salah satu faktor penentu masuknya penanaman modal asing. Gangguan keamanan yang terjadi belakangan ini berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Saat ini investor asing yang berdatangan ke Indonesia banyak juga yang datang dari AS, selain dari Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Aspek keamanan terkait aksi unjuk rasa yang menandakan berjalannya proses demokrasi tetapi harus berujung anarkis membawa dampak yang kurang baik bagi iklim investasi. Kondisi ini membuat investor bersikap menunggu hingga keamanan kondusif. Akibatnya, investor yang seharusnya sudah masuk dan memulai aktivitas usahanya harus tertunda menunggu kepastian keamanan. Adanya aksi demonstrasi yang besar dan disiarkan media membuat investor asing mempertanyakan kemungkinan dampak yang terjadi pada aktivitas usahanya. Selain itu, kurangnya perlindungan kawasan industri oleh aparat penegak hukum menjadi faktor pertimbangan juga bagi investor asing.

c. Pasokan energi kurang terjamin

Kurangnya jaminan pasokan energi sebagai sumber listrik manjadi hambatan dalam iklim investasi di Indonesia. Alternatif terkait pasokan energi mulai dari batubara, gas, pasokan listrik dari PT PLN. Namun, masing-masing sumber energi ini di Indonesia masih menghadapi kendala. Permasalahan utama terkait gas bumi adalah pasokan gas bumi untuk domestik tidak mencukupi *real demand* yang ada disebabkan kontral gas banyak yang sudah terikat kontrak jangka panjang. Selain itu, ketiadaan infrastruktur gas juga membuat cadangan gas yang ada di Kalimantan dan Papua belum dapat dipergunakan untuk memenuhi pusat-pusat industri yang terletak di pulau Jawa dan Sumatera. Seperti contohnya, kurangnya pasokan gas untuk PLTGU milik PLN dimana total kebutuhan gas tahun 2011 sebesar 2.060 bbtud hanya dipenuhi 832 bbtud. Hal yang sama terjadi pada industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utama dimana *real demand* gas yang mencapai 1.529 bbtud hanya dapat dipenuhi sebesar 494 bbtud. Kondisi ini jelas dapat menghilangkan kesempatan derasnya investasi asing (FDI) yang masuk saat ini ke Indonesia.

d. Birokrasi yang Sulit

Dalam hal ini pemerintah Indonesia melaluli BKPM memberikan Beri Layanan Terpadu. Sementara itu, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Investasi BKPM pemerintah telah memberikan layanan terpadu satu pintu, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mengurangi pungutan-pungutan liar karena dapat mengurangi investasi masuk ke Indonesia (http://www.kemenperin.go.id/arti

kel/3313/Menperin-Mendorong-Peningkatan-Daya-Saing-Industri-Nasional 21/07/2013).

e. Buruknya infrastruktur

Infrastruktur yang ada menjadi salah satu hambatan bagi meningkatkan investasi di Indonesia. Padahal infrastruktur kerap dijadikan pertimbangan dan pra syarat utama bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya.

Pemerintah bertekad mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ditetapkan melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan pendekatan konektivitas Koridor Ekonomi. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur sampai saat ini, masih jadi keluhan bagi pengusaha maupun calon investor yang akan membenamkan modalnya di negeri ini. Maklum, buruknya infrastruktur, bukan cuma menghambat kinerja dunia usaha, namun juga kerap memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi. Misalnya jalan yang rusak atau kinerja pelayanan di pelabuhan yang lambat, bisa menimbulkan keterlambatan *shipment* (pengapalan) dan pengiriman barang yang berujung kian membengkaknya biaya pengiriman barang.

Survei yang pernah dilakukan *World Economic Forum* (WEF) yang berjudul *Global Competitiveness Report* beberapa waktu lalu juga menunjukkan bahwa tidak memadainya kualitas infrastruktur di Indonesia, menjadi masalah mendasar *"Doing Business in Indonesia"* setelah birokrasi pemerintah yang dinilai masih belum efisien. Dari sekian aspek tersebut, masalah utama yang masih jadi ganjalan dalam melakukan bisnis/investasi di Indonesia adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, korupsi, dan infrastruktur yang belum

memadai. Di banding negara lain di kawasan Asia Tenggara, infrastruktur Indonesia masih merupakan yang paling lemah.*"Debottlenecking Infrastruktur"* menjadi persoalan nyata yang masih menjadi ganjalan.

Sulit dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan di tanah air masih berjalan lambat, bakan nyaris stagnan. Misalnya akses jalan, sarana bandara, pelabuhan yang terbatas. Sistem logistik dan pengangkutan juga belum ada keterpaduan, sehingga sering memicu timbulnya *high cost economic* (ekonomi biaya tinggi) dari jasa angkutan dan distribusi (http://www.eksekutif.co.id/gaya-hidup/entertaiment/746-buruknya-infrastruktur-masih-jadi-ganjalan.html Diakses 10/08/2013).